



## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang perencanaan, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang dirumuskan ke dalam rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Keberadaan Rencana Strategis ini sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) sekaligus bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan hingga tahun 2017.

Terima kasih diucapkan kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan ini.

Jakarta, Agustus 2013

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,  
DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA

Ir. SUGIYANTA, M.SI  
NIP.196007051985031014



## Daftar Isi

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>2</b>  |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>  | <b>3</b>  |
| I.1 Latar Belakang.....   | 3         |
| I.2 Landasan Hukum .....  | 4         |
| I.3 Maksud dan Tujuan.....  | 5         |
| I.4 Sistematika Penulisan .....   | 6         |
| <b>BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFOMAS .....</b>   | <b>7</b>  |
| II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kominfomas.....   | 7         |
| II.2 Sumber Daya Dinas Kominfomas dan Kinerja Pelayanan Dinas Kominfomas..                                      | 10        |
| II.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfomas .....  | 13        |
| <b>BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....</b>   | <b>15</b> |
| III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfomas .....                   | 15        |
| III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....                      | 17        |
| III.3 Telaahan Renstra K/L.....   | 23        |
| III.4 Telaahan Rencana Kominfomas Wilayah .....   |           |
| III.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....  | 24        |
| <b>BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>                                       | <b>25</b> |
| IV.1 Visi dan Misi Dinas Kominfomas.....  | 25        |
| IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfomas .....  | 25        |
| IV.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfomas .....  | 32        |
| <b>BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b> | <b>35</b> |
| <b>BAB VI : INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFOMAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN.....</b>                    | <b>37</b> |
| <b>BAB VII : KAIDAH PELAKSANAAN.....</b>  | <b>40</b> |



## Bab I

### Pendahuluan

#### I.1 Latar Belakang

Di era teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang dengan sangat pesat seperti saat ini, informasi telah menjadi salah satu kunci penting bagi kemajuan suatu masyarakat. Masyarakat yang memiliki akses lebih terhadap informasi dan dapat memanfaatkan informasi tersebut dengan baik memiliki peluang yang lebih besar untuk berada di depan masyarakat lainnya. Indonesia sebagai negara dengan bentang wilayah yang sangat strategis baik secara geografis dan politis di dunia internasional, didukung dengan jumlah penduduk yang besar dan sumber daya alam yang sangat berlimpah, memiliki modal yang cukup untuk mengambil peran penting di dunia internasional. Daya saing komparatif yang dimiliki oleh Indonesia sebagai bangsa yang besar sudah saatnya juga didukung dengan daya saing kompetitif yang baik untuk dapat turut serta memainkan peranan kunci di antara negara-negara dunia lainnya.

Ibukota Jakarta, sebagai lokasi pusat pemerintahan dan banyak sektor-sektor strategis lainnya dijalankan, adalah wilayah yang sangat berpotensi untuk menjadi wilayah terdepan dalam pemanfaatan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi dan pemerintahan daerahnya menjadi pemerintah daerah terdepan untuk dapat menjadi *benchmark* (acuan) bagi daerah lain dalam penerapan urusan komunikasi dan informasi di Indonesia. Selain itu, Jakarta juga memegang peranan yang besar dalam penyebaran informasi dan aktivitas komunikasi antar yang merata ke seluruh daerah. Dengan dijadikannya Jakarta sebagai sorotan utama media massa, surat kabar dan media-media pemberitaan nasional, apa yang terjadi di Jakarta tidak lagi hanya menjadi konsumsi masyarakat yang tinggal di Jakarta saja, namun juga masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia.

Dari gambaran singkat diatas, cukup terlihat betapa Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan sebagai instrumen pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan komunikasi, informatika, dan kehumasan memiliki peran yang cukup



besar dan berpengaruh terhadap perkembangan yang terjadi dalam ruang lingkup lokal dan nasional.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimana Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan yang selanjutnya disingkat



menjadi Dinas Kominfomas adalah salah satu perangkat daerah yang bertugas untuk menjalankan urusan komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa masing-masing Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas pemerintahannya dan menyusun dokumen perencanaan, baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta akan habisnya masa berlaku Rencana Strategis Dinas Kominfomas Tahun 2010-2012 maka Dinas Kominfomas perlu melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

## I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan tahun 2013-2017 ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.
12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
13. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2012 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2012 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Provinsi

### I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kominfomas 2013-2017 ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan dan arahan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfomas selama lima tahun (2013-2017).

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 ini adalah:

1. Sebagai acuan bagi pelaksanaan urusan komunikasi, informatika dan kehumasan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2013-2017;



2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta;
3. Sebagai acuan bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta;

#### I.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan



## Bab II

### Gambaran Umum

#### Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan

##### II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kominfomas

Kedudukan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang bertugas melaksanakan urusan komunikasi dan informatika. Dalam pelaksanaan kedudukan tersebut, Dinas Kominfomas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kominfomas memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas komunikasi, informatika, dan kehumasan;
2. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan komunikasi, informatika, dan kehumasan;
3. pelaksanaan kehumasan;
4. pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan teknologi informasi;
5. pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan komunikasi;
6. pembinaan pos dan telekomunikasi;
7. pembinaan, dan pengembangan tenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata komputer;
8. pengembangan jejaring kerja kehumasan;
9. publikasi, pelayanan informasi dan pendokumentasian kegiatan kebijakan pemerintah daerah;
10. fasilitasi dan pengoordinasian akses publik terhadap pemerintah daerah;
11. pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan klarifikasi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
12. pengelolaan media cetak dan elektronik;
13. pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika;





14. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang komunikasi dan informatika;
15. pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan usaha pos, telekomunikasi dan informatika;
16. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
17. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas komunikasi, informatika, dan kehumasan; dan
18. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Dinas Kominfomas yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfomas dilengkapi dengan perangkat-perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat,
2. Bidang Media Massa,
3. Bidang Informasi Publik,
4. Bidang Infrastruktur Perangkat Lunak,
5. Bidang Sistem Informasi Manajemen,
6. Bidang Infrastruktur Perangkat Keras,
7. Bidang Pos dan Telekomunikasi,
8. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi,
9. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kabupaten Administrasi
10. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
11. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi (KIP)
12. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

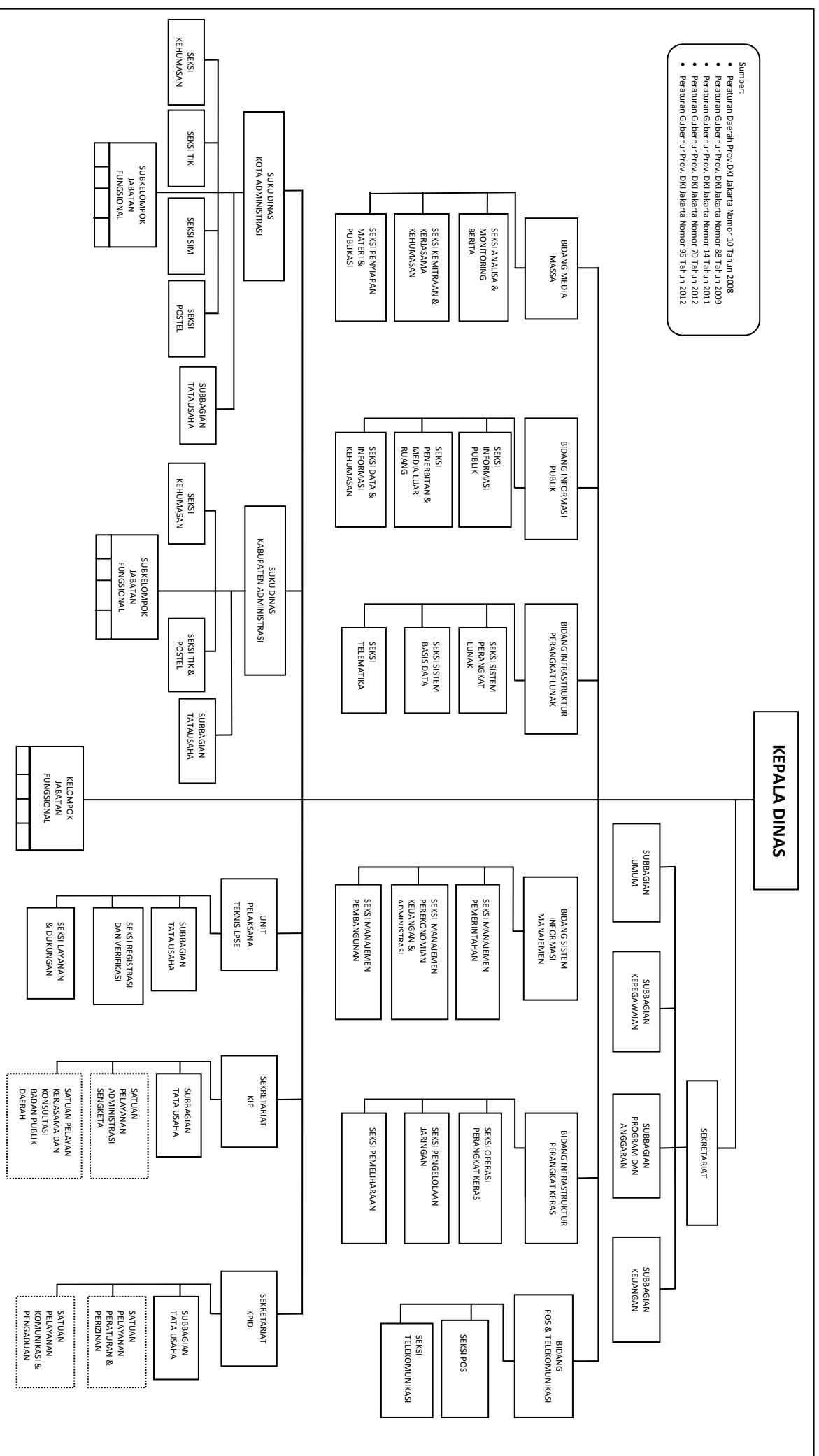
Struktur Organisasi Dinas Kominfomas berdasarkan Pergub No. 88 tahun 2009 dapat dilihat pada Gambar II.1. sedangkan Struktur Organisasi LPSE, KIP dan KPID dapat dilihat pada Gambar II.2.





Gambar II.1.

# Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan



- Sumber:
- Peraturan Daerah Prov.DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008
  - Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2009
  - Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011
  - Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2012
  - Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2012



## II.2 Sumber Daya Dinas Kominfomas dan Kinerja Pelayanan Kominfomas

### 1. Sumber Daya Dinas Kominfomas

Sumber daya yang handal adalah salah satu faktor utama keberhasilan sebuah organisasi disamping dukungan kebijakan dan anggaran. Sebagai sebuah organisasi pemerintahan, kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Kominfomas sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Berikut ini adalah data sumber daya manusia Dinas Kominfomas tahun 2013:

Tabel II.1

#### Kondisi Aparatur Dinas Kominfomas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| TK. PENDIDIKAN | PROVINSI   | JP        | JU        | JB        | JS        | JT        | KS        | TOTAL      |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| SD             | 4          | -         | -         | 1         | -         | 1         |           | 6          |
| SLTP           | 3          | -         | -         | -         | -         | -         |           | 3          |
| SMA/SEDERAJAT  | 46         | 7         | 5         | 2         | 4         | 5         | 4         | 73         |
| D3             | 12         | -         | 1         | 2         | 3         |           | 1         | 19         |
| S1             | 108        | 17        | 10        | 7         | 14        | 17        | 5         | 178        |
| S2             | 9          | 1         | 1         | 4         | -         | 1         | 2         | 18         |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>182</b> | <b>25</b> | <b>17</b> | <b>16</b> | <b>21</b> | <b>24</b> | <b>12</b> | <b>297</b> |

Sumber : Dinas Kominfomas April 2013

Tabel II.2

#### Kondisi Aparatur Dinas Kominfomas Berdasarkan Golongan

| GOLONGAN      | PROVINSI   | JP        | JU        | JB        | JS        | JT        | KS        | TOTAL      |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| I             | 1          | -         | -         | -         | -         | -         | -         | 1          |
| II            | 23         | 1         | 1         | 2         | 2         | 2         | 2         | 33         |
| III           | 154        | 23        | 15        | 12        | 18        | 21        | 9         | 252        |
| IV            | 4          | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 1         | 11         |
| <b>JUMLAH</b> | <b>182</b> | <b>25</b> | <b>17</b> | <b>16</b> | <b>21</b> | <b>24</b> | <b>12</b> | <b>297</b> |

Sumber : Dinas Kominfomas April 2013

Tabel II.3

#### Kondisi Aparatur Dinas Kominfomas Berdasarkan Usia

| UNIT WILAYAH  | UMUR      |           |           |           |           |           |           | TOTAL      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|               | < 26      | 26-30     | 31-35     | 36-40     | 41-45     | 46-50     | 51-56     |            |
| Provinsi      | 8         | 39        | 22        | 19        | 18        | 34        | 42        | 182        |
| JP            | 1         | 5         | 3         | 3         | 2         | 6         | 5         | 25         |
| JU            | 1         | 4         | 2         | 1         | 1         | 2         | 6         | 17         |
| JB            | 1         | 3         | 1         | -         | 2         | 6         | 3         | 16         |
| JS            | -         | 8         | -         | 1         | 4         | 3         | 5         | 21         |
| JT            | -         | 5         | 1         | 2         | 4         | 8         | 4         | 24         |
| Kep. Seribu   | 1         | 1         | 2         | 2         | 1         | 4         | 1         | 12         |
| <b>Jumlah</b> | <b>12</b> | <b>65</b> | <b>31</b> | <b>28</b> | <b>32</b> | <b>65</b> | <b>73</b> | <b>297</b> |

Sumber : Dinas Kominfomas April 2013



## 2. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfomas

Kinerja pelayanan Dinas Kominfomas selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel II.5, sedangkan kinerja keuangan Dinas Kominfomas dapat dilihat pada tabel II.6.

### II.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfomas

Mulai saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik serta melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.

Jakarta sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional dan internasional harus memiliki daya saing yang handal sehingga diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik kota. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga kota Jakarta dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi.

Untuk menjadi kota internasional yang kompetitif, Jakarta perlu membangun infrastuktur telematika yang maju, modern dan handal. Penggunaan telematika menjadi tulang punggung pembangunan Jakarta menuju kota pintar yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan. Pendayagunaan Telematika akan sangat mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi kota, terutama pada sektor transportasi, logistik, dan juga sektor lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, perlu dilakukan penataan kembali secara sistematis prasarana dan sarana, kelembagaan, sumber daya manusia, dan aturan hukum/tata laksana telematika yang memadai sehingga akan terwujud sinergi komponen-komponen telematika



yang serasi dan mampu meningkatkan daya saing Kota Jakarta baik di tingkat regional ASEAN maupun tingkat global.

Bercermin kepada ketersediaan sumber daya dan kinerja pelayanan Dinas Kominfomas serta melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat baik lokal, nasional maupun global, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Kominfomas pada lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

- Masih banyaknya aparatur Dinas Kominfomas yang memiliki tingkat pendidikan di bawah Diploma;
- Banyaknya informasi tentang kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum tersampaikan kepada masyarakat luas;
- Banyaknya informasi yang berkembang melalui media massa yang mempengaruhi opini masyarakat;
- Trend pelayanan urusan pemerintahan yang bergeser ke arah layanan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi;
- Besarnya potensi tindakan kejahatan yang mengancam fasilitas dan infrastruktur publik;
- Berkembangnya isu ramah lingkungan dan *paperless office* yang menuntut pemanfaatan sumber daya alam terutama kertas dan hasil hutan lainnya secara lebih efisien dan hemat;
- Belum tertatanya jaringan telekomunikasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- Belum berkembangnya jejaring kehumasan di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2. Peluang

- Banyaknya lembaga penyedia beasiswa pendidikan bagi aparatur pemerintahan untuk penguatan potensi dan kompetensi aparatur pemerintahan;
- Pemanfaatan media massa baik surat kabar cetak maupun elektronik dan online untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung kinerja pengawasan terhadap informasi yang tidak sesuai;



- Semakin mudahnya pengaplikasian teknologi di bidang Informasi dan Komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;
- Semakin majunya teknologi keamanan sistem informasi dan semakin meningkatnya kemampuan berbagai instansi pemerintahan dalam penanganan tindak kejahatan cyber (*cyber crime*);
- Optimalisasi pemanfaatan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi menguras sumber daya alam;
- Semakin beragam dan semakin praktisnya piranti keras yang ada di pasaran dalam mendukung peningkatan kinerja;
- Berkembangnya perusahaan di bidang telekomunikasi di Provinsi DKI Jakarta.



Tabel II. 5  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfomas  
Provinsi DKI Jakarta

| No  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kominfomas                                   | Target SPM | Target IKK | Target IKU       | Target Renstra Dinas Kominfomas Tahun ke- |     |     |        |      | Realisasi Capaian Tahun ke- |      |      |        |      | Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|--|------------|------------|------------------|---|-----|-----|--------|------|-----------------------------|------|------|--------|------|------------------------|------|------|------|------|
|     |  |            |            |                  | 08  | 09  | 10  | 11     | 12   | 08                          | 09   | 10   | 11     | 12   | 08                     | 09   | 10   | 11   | 12   |
| (1) | (2)  | (3)        | (4)        | (5)              | (6)                                       | (7) | (8) | (9)    | (10) | (11)                        | (12) | (13) | (14)   | (15) | (16)                   | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1   | Peningkatan (hit count) pengakses website www.beritajakarta.com                              |            |            | 2,5 jt pengakses |   |     |     | 2,5 jt |      |                             |      |      | 2,4 jt |      |                        |      |      | 96%  |      |
| 2   | Terbentuknya Kelembagaan Informasi Publik Daerah Provinsi DKI Jakarta                        |            |            | 2                |   |     |     | 2      |      |                             |      |      | 2      |      |                        |      |      | 100% |      |
| 3   | Terbangunnya Aplikasi yang dikembangkan sesuai RITIK   |            |            | aplikasi         |   | 15  |     | 2      |      |                             | 14   |      | 2      |      |                        | 71%  |      | 100% |      |
| 4   | Terkoneksinya jaringan intranet/internet di SKPD/UKPD  |            |            | Kec              |   |     |     | 44     |      |                             |      |      | 44     |      |                        |      |      | 100% |      |
|     |  |            |            | Kel              |   |     | 265 | 267    |      |                             |      | 261  | 267    |      |                        |      | 98%  | 100% |      |
|     |  |            |            | SKPD/UKPD        |   |     |     | 22     |      |                             |      |      | 22     |      |                        |      |      | 100% |      |
| 5   | Jumlah SKPD yang menerapkan e-procurement  |            |            |                  | 61  | 242 | 719 | 726    |      | 54                          | 100  | 193  | 284    |      | 88%                    | 41%  | 27%  | 39%  |      |
| 6   | Terpublikasinya Pemberitaan Positif pada Media TV dan Radio                                  |            |            | TV/Radio         |   |     | 5   | 233    |      |                             |      | 5    | 233    |      |                        |      | 100% | 100% |      |
|     |  |            |            | Judul            |   |     | 5   | 44     |      |                             |      | 5    | 44     |      |                        |      | 100% | 100% |      |
|     |  |            |            | Spot             |   |     |     |        | 350  |                             |      |      | 350    |      |                        |      |      | 100% |      |
| 7   | Terdistribusinya Pemberitaan Positif Media Luar Ruang  |            |            | Wilayah          |   |     |     |        | 6    |                             |      |      | 5      |      |                        |      |      | 98%  |      |
| 8   | Terdapatnya referensi lengkap tentang data dan informasi daerah yang terkini bagi masyarakat |            |            | Kategori         |   |     |     | 261    |      |                             |      | 261  |        |      |                        |      |      | 100% |      |

Sumber : Dinas Kominfomas



Tabel II. 6  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfomas  
Provinsi DKI Jakarta

| Uraian                 | Anggaran pada Tahun ke- |      |          |       |        | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |      |      |       |        | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |         |           |           |           |
|------------------------|-------------------------|------|----------|-------|--------|-----------------------------------|------|------|-------|--------|---|---------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 2008                    | 2009 | 2010     | 2011  | 2012   | 2008                              | 2009 | 2010 | 2011  | 2012   | 2008  | 2009    | 2010      | 2011      | 2012      |
| (1)                    | (2)                     | (3)  | (4)      | (5)   | (6)    | (7)                               | (8)  | (9)  | (10)  | (11)   | (12)  | (13)    | (14)      | (15)      | (16)      |
| Belanja langsung       |                         | 55M  | 27M      | 132.M | 200,7M |                                   | 33M  | 10M  | 107 M | 141,2M |   | 60<br>% | 73,8<br>% | 81,3<br>% | 70,<br>7% |
| Belanja tidak langsung |                         | 23M  | 101<br>M | 28 M  | 33,7M  |                                   | 20M  | 67M  | 26 M  | 30,5M  |   | 86<br>% | 73,8<br>% | 93,7<br>% | 90,<br>4% |



### Bab III

#### Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

##### III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

###### Kominfo

Dinas Kominfo sebagai unsur pelaksana otonomi daerah urusan komunikasi dan informatika memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Dalam menjalankan perannya tersebut, terdapat banyak permasalahan yang perlu mendapat penanganan demi terlaksananya semua tugas dan fungsi Dinas Kominfo. Berbagai keberhasilan yang diraih oleh Dinas Kominfo diharapkan dapat berdampak positif terhadap perangkat-perangkat pemerintahan daerah lainnya.

Sebagaimana diketahui bersama, teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi faktor akselerasi pembangunan, karenanya peluang untuk mempercepat pembangunan berbasis teknologi informasi dan komunikasi haruslah dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan sekaligus lokasi pusat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Indonesia terjadi, Provinsi DKI Jakarta bukanlah daerah yang tanpa permasalahan. Dengan semakin pesatnya perkembangan di dunia teknologi informasi dan semakin mudahnya publik mengakses informasi dari manapun ia berasal, kelengkapan infrastruktur perangkat lunak dan perangkat keras haruslah dapat mengimbangi.

Ketimpangan antara perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dan kesiapan infrastruktur wilayah dapat menyebabkan eks negatif terhadap pembangunan yang berlangsung dan penanganan ekspektasi masyarakat yang cenderung telah siap dalam memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Dengan diperkuatnya infrastruktur untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka DKI Jakarta dapat menjadi kota pintar (*smart city*) dan percontohan penerapan kota cyber (*cyber city*) di Indonesia.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, arus

informasi dapat mengalir dengan sangat cepat, selain itu wilayah-wilayah yang terpisah secara geografis (memiliki pemisah geografis) dapat tetap terhubung. Karenanya ketersediaan sebuah laman web sangatlah dibutuhkan untuk dimiliki oleh instansi pemerintahan dalam upayanya menyampaikan informasi-informasi terkait pelayanan instansi tersebut. Namun yang terjadi saat ini, belum seluruh instansi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki laman web atau telah memiliki hanya saja belum optimal. Hal ini menjadi faktor yang melemahkan pelayanan informasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakatnya.

Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan peran-peran pemerintahan haruslah ditangani dengan lebih serius di masa depan, hal ini dilakukan untuk dapat mewujudkan pelayanan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi elektronik (*e-government*) yang dapat memberikan efisiensi, ketersebaran yang lebih merata, dan transparansi pelayanan. Penerapan *e-government* dikembangkan tidak hanya untuk mengikuti trend yang terjadi di kalangan masyarakat, namun juga untuk mewujudkan pelayanan yang merata, rendah biaya, dan dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

Dengan menilik kembali pada permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas, aspek pemerataan pelayanan informasi adalah salah satu isu utama yang menjadi perhatian di masa depan. Di lain sisi, melihat bentang geografis dan tingkat pertumbuhan di Provinsi DKI Jakarta, wilayah Kepulauan Seribu cenderung memiliki hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah DKI Jakarta yang berada di daratan utama. Untuk itu harus ada sebuah tindakan strategis yang khusus diberikan untuk memenuhi pelayanan yang adil kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Kepulauan Seribu.

Permasalahan lain yang berkembang di lingkungan Dinas Kominfomas adalah kapasitas sumber daya aparatur. Hal ini harus ditangani dengan bijak untuk dapat mewujudkan pelayanan prima di lingkungan Dinas Kominfomas. Peningkatan kapasitas dengan pelatihan atau program-program peningkatan kapasitas lain perlu mendapat perhatian lebih untuk dilakukan di masa depan.

### III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025, visi misi dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 mempunyai keterkaitan dengan visi RPJPD yaitu “Jakarta : Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global” dengan misi :

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;
2. Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas;
3. Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya;
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
5. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; dan
6. Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017:

**“JAKARTA BARU, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI, MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MASYARAKAT YANG BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”**

Dalam visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Jakarta adalah:

- Ibu kota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
- Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
- Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.

- Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;
3. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;
4. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
5. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

**Dari berbagai program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diatas, isu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Kominfomas terdapat pada misi Gubernur yang pertama dan kelima yaitu:**

- Misi Pertama: mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- Misi Kedua: membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan public

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada hakikatnya misi pertama merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada penataan ruang ekonomi, infrastruktur ekonomi dan sistem distribusi logistik yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian kota.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, pemerintah kota tidak dapat menghindari dari persaingan antar kota-kota secara global. Begitu pula, Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Sedikitnya kota Jakarta harus berorientasi pada kota pintar (smart city) yang memperhatikan tiga hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa-perdagangan dan arus investasi, pembangunan kota yang memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan. Pengembangan kota Jakarta sebagai kota modern dilaksanakan berdasarkan potensi sumberdaya manusia dan ciri khas yang dimilikinya.

Membangun kota Jakarta dengan potensi ekonomi dan bisnis yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan positioning kota, differensiasi dan branding atas produk-produk yang dimiliki kota Jakarta. Selain itu pembangunan kota Jakarta harus memperhatikan keberlanjutan di masa depan melalui perwujudan tata ruang kota yang rapi dan konsisten.

## 2. Misi Kelima: Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

Pada hakikatnya misi kedua merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/kabupaten dan Provinsi serta kemudahan pengurusan perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu didorong untuk menunjang perwujudan kota Jakarta sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan pilar utama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi.

Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana dan manajemen, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif, efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi serta tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dirasa belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Pelayanan Terpadu Satu Atap yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perizinan dan pelayanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak, proses penyediaan barang dan jasa, dan pelayanan administrasi kependudukan telah dikembangkan dan dapat diakses secara online melalui sistem informasi.

Berdasarkan misi pertama dan kelima sebagaimana dimaksud diatas, tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan:

1. Mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran:

1. Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik;
2. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten.

Misi Kelima : Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik

Tujuan:

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan;
2. Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat;

Sasaran:

1. Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih;
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi;

Pilihan strategi untuk pencapaian misi pertama dan kelima dalam urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota.  
Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan daya tarik investasi melalui penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang memadai dengan strategi operasional yaitu Pengembangan Sistem dan Jaringan Telekomunikasi pada Kantor Pemerintahan, Pusat Pelayanan Publik dan Tempat Umum.
2. Penataan kelembagaan, organisasi, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dengan strategi operasional meliputi:
  - a. Pengembangan tata laksana pemerintahan yang transparan dan akuntabel,
  - b. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan strategi operasional pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time.
4. Peningkatan pelayanan publik dengan strategi operasional meliputi:
  - a. Pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik
  - b. Penyelenggaraan Program Teknis urusan pemerintahan wajib dan pilihan.



### III.3 Telaahan Renstra K/L

Dalam melakukan telaahan terhadap Renstra K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfomas, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014 menjadi salah satu masukan yang penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Kominfomas di masa depan.

Permasalahan-permasalahan yang tercantum di dalam Renstra Kemenkominfo tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi serta media berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait.
2. Pengaturan/regulasi di bidang komunikasi dan informatika yang masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi.
3. Belum terbangunnya budaya kerja yang kuat di dalam lingkungan Kementerian Kominfo. Serta belum berfungsinya pengawasan program dan kegiatan dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.
4. Penyediaan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi dengan melibatkan sektor swasta dan *stakeholders* lainnya. Hal ini dilakukan karena di masa depan, teknologi komunikasi dan informatika bukan lagi menjadi domain negara saja, namun juga telah menjadi bagian dari domain publik yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas.
5. Penguatan pemahaman masyarakat terhadap akses informasi, sehingga tidak ada lagi kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi.
6. Pasar, pelaku usaha, dan tindakan pelanggaran hak cipta terhadap hasil karya di bidang komunikasi dan informatika baik pada sisi perangkat lunak maupun perangkat keras.

### III.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah menelaah permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kominfomas, Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dokumen Rencana Strategis K/L, maka dapat disimpulkan bahwa isu strategis Dinas Kominfomas selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemberitaan pelayanan dan capaian pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Optimalisasi pelayanan data dan informasi publik
3. Optimalisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
4. Optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
5. Optimalisasi pelayanan di bidang Pos dan Telekomunikasi
6. Optimalisasi layanan pengadaan secara elektronik

## Bab IV

### Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan

#### IV.1 Visi dan Misi Dinas Kominfomas

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kominfomas dan juga untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka Dinas Kominfomas perlu menetapkan Visi dan Misi Dinas Kominfomas. Visi Dinas Kominfomas adalah:

#### **MEWUJUDKAN JAKARTA BARU MELALUI LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL DAN PROFESIONAL**

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Dinas Kominfomas menetapkan empat buah Misi, yaitu :

1. Mengembangkan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota
2. Mengembangkan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik

#### IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfomas

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Kominfomas diatas, maka Dinas Kominfomas merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah untuk dapat diraih selama lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Kominfomas adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di bidang Pos dan Telekomunikasi

3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan prima melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas layanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.
4. Terwujudnya pelayanan data dan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat.

Selanjutnya untuk menjamin bahwa tujuan diatas dapat dicapai, maka keempat tujuan tersebut haruslah memiliki sasaran untuk mengukur masing-masing tujuan tersebut. Sasaran dari masing-masing tujuan diatas adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Sasaran dari Tujuan Pertama adalah:

1. Meningkatnya pendayagunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota.

Alat ukur:

- a. Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun.
- b. Presentase ketersediaan sarana dan prasarana TIK

Tujuan 2:

Sasaran dari Tujuan kedua adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang Pos dan Telekomunikasi.

Alat ukur:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pos dan Telekomunikasi.
- b. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pertelekomunikasian.

Tujuan 3:

Sasaran dari tujuan ketiga adalah:

1. Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi pada pelayanan publik seluruh SKPD

Alat ukur:

- a. Sistem pelayanan terpadu secara on-line
- b. Persentase SKPD/UKPD yang menggunakan sistem informasi dalam mendukung pelayanan dan pengelolaan pemerintahan
2. Meningkatnya jumlah pengguna layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik
  - a. Tingkat kepatuhan SKPD/UKPD terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Tujuan 4:

Sasaran dari Tujuan keempat adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.

Alat ukur:

- a. Presentase aspirasi masyarakat yang diakomodir
2. Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik
  - b. Tingkat penyebarluasan data dan informasi melalui media eksternal dan internal
  - c. Tingkat kepuasan pelayanan data dan informasi publik Pemprov DKI Jakarta.

Tabel IV.1

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
DINAS KOMINFOMAS 2013-2017

| Visi : MEWUJUDKAN JAKARTA BARU MELALUI LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL DAN PROFESIONAL  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Misi   | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran  |
| Mengembangkan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota   | Meningkatnya pendayagunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun.</li> <li>Presentase ketersediaan sarana dan prasarana TIK</li> </ul>  |
|  | Terwujudnya peningkatan pelayanan Pos dan Telekomunikasi  | Meningkatkan kualitas pelayanan Pos dan Telekomunikasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kepuasan terhadap layanan pos dan telekomunikasi</li> <li>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana telekomunikasi</li> </ul>  |
| Mengembangkan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien   | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan prima melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan sistem informasi pada pelayanan publik seluruh SKPD</li> <li>Meningkatnya jumlah pengguna Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem pelayanan terpadu secara on-line</li> <li>Persentase SKPD/UKPD yang menggunakan teknologi dan sistem informasi dalam mendukung pelayanan dan pengelolaan pemerintahan</li> <li>Tingkat kepatuhan SKPD/UKPD terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik</li> </ul> |
| Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik  | Terwujudnya pelayanan data dan Informasi publik secara cepat, tepat, dan akurat   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan</li> <li>Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik</li> </ul>                           | <p>Presentase aspirasi masyarakat yang diakomodir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat penyebarluasan data dan informasi melalui media eksternal dan internal</li> <li>Tingkat kepuasan pelayanan data dan informasi publik Pemprov DKI Jakarta.</li> </ul>  |

### IV.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kominfomas

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan diatas, diperlukan Strategi dan Kebijakan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kominfomas dalam lima tahun ke depan. Berikut ini adalah Strategi dan Kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Kominfomas:

Tabel IV.2

STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
DINAS KOMINFOMAS TAHUN 2013-2017

| SASARAN   | STRATEGI   | KEBIJAKAN   |
|---|--|---|
| Meningkatnya pendayagunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota | Peningkatan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi kota melalui pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum | Menjadikan Jakarta sebagai smart city antara lain melalui Pengintegrasian jaringan serat optik dengan utilitas lain dan penyediaan fasilitas jaringan wifi di tempat-tempat umum dan di kantor-kantor pemerintahan serta Penataan dan pengelolaan Data Center dan Disaster Recovery Center (DRC)                                |
| Meningkatkan kualitas pelayanan Pos dan Telekomunikasi  | Pengembangan sistem dan jaringan telekomunikasi pada kantor pemerintahan, pusat pelayanan publik dan tempat umum   | Pengintegrasian jaringan serat optik dengan utilitas lain dan penyediaan fasilitas jaringan wifi di tempat-tempat umum dan di kantor-kantor pemerintahan  |
|   | Peningkatan kapasitas layanan perposan dan telekomunikasi  | Meningkatkan layanan perposan dan telekomunikasi  |
| Meningkatnya pendayagunaan teknologi dan sistem informasi pada pelayanan publik seluruh SKPD  | Pengembangan Sistem dan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik   | (1) Melaksanakan Pemantauan langsung melalui CCTV di semua lokasi pelayanan publik dan kantor-kantor pemerintahan<br><br>(2) Mengembangkan integrasi sistem informasi pelayanan dan pengelolaan pemerintahan,<br><br>(3) Meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengelolaan Pemerintahan |
| Meningkatnya jumlah pengguna Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik  | Meningkatkan sarana dan prasarana serta wawasan pengguna Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik   | Memperkuat kelembagaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik  |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan   | Pengembangan mekanisme pengaduan berbasis sistem informasi yang real time  | Meningkatkan penyediaan informasi dan ruang aspirasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi   |
| Meningkatnya kualitas pelayanan data dan informasi publik   | Menumbuhkembangkan diseminasi dan distribusi informasi secara masiv dan masal  | (1) Meningkatkan pemanfaatan media massa, media online, media sosial, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang,<br>(2) pengembangan dan pemberdayaan komunitas informasi   |



## Bab V

### Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bagian ini akan menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (tahun 2013-2017).

Adapun komponen program dalam rangka pelaksanaan misi Diskominfomas adalah:

1. Mengoptimalkan pelayanan publik dan aparatur berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Bidang Sistem Informasi Manajemen, melalui program:
  - **Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**
2. Melakukan penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi oleh Bidang Infrastruktur Perangkat Lunak dan Bidang Infrastruktur Perangkat Keras melalui program:
  - **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi**
3. Meningkatkan kualitas layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh pengelola LPSE melalui program:
  - **Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**
4. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik serta penguatan media dan komunikasi jejaring kehumasan yang dilaksanakan oleh Bidang Informasi Publik dan Bidang Media Massa melalui program:
  - **Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik**
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sarana prasarana bidang Pos dan Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Bidang Pos dan Telekomunikasi melalui program:
  - **Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos Serta Telekomunikasi**

Berdasarkan pada program tersebut diatas maka Sudin Kominfomas mendukung melaksanakan program yang sama pada bidang yang ada pada Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 5.1

Rangkaian Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

| PROGRAM   | KEGIATAN   | INDIKATOR KINERJA   |
|---|--|---|
| Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi         | (1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Layanan Publik dan Aparatur Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), (2) Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), (3) Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah (SIMPEG), (4) Integrasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), (5) Optimalisasi Pendayagunaan CCTV   | (1) Integrasi Sistem informasi perencanaan, Pengelolaan keuangan Daerah dan Pengawasan pengelolaan Pembangunan, (2) Berfungsinya aplikasi pelayanan publik PTSP Berbasis Teknologi Informasi, (3) Jumlah titik CCTV yang terbangun dikantor-kantor pemerintah, RSUD, sekolah dan BLK    |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi | (1) Operasionalisasi dan Optimalisasi Jaringan WIFI, (2) Penataan/Pengelolaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), (3) Penataan/Pengelolaan jaringan Intranet dan Internet, (4) Penataan/Pengelolaan Operating System (OS) dan Database, (5) Penataan/Pengelolaan Sistem Keamanan DC, DRC dan Jaringan   | (1) Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun, (2) Jumlah Data Center yang berfungsi, (3) Jumlah Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi, (4) Jumlah Titik Lokasi layanan Pemda yang terkoneksi dengan Jaringan komunikasi (intranet dan internet) |
| Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik        | (1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, (2) Penataan dan Pendayagunaan Sarana Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik   | (1) Terlaksananya pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan sistem nasional, (2) Jumlah pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih  |
| Komunikasi, Data dan Informasi Publik                               | (1) Pelaksanaan Monitoring dan Analisis Berita, (2) Pengelolaan Layanan Pengaduan dan Respon Opini Publik, (3) Pelayanan Informasi Melalui Media Online Warta DKI "www.beritajakarta.com", (4) Pengelolaan dan Pengembangan Website Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (5) Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Massa dan Elektronik, (6) Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Luar Ruang dan Penerbitan Tercetak, (7) Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Media Tradisional dan Interpersonal, (8) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), (9) Fasilitasi dan Operasionalisasi Komisi Informasi Provinsi (KIP), (10) Fasilitasi dan Operasionalisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) | (1) Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media, (2) Tersedianya sarana informasi kepada masyarakat   |
| Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi             | (1) Pelaksanaan Pengelolaan Radio Trunking, (2) Penataan dan Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi, CCTV dan Multimedia, (3) Pelayanan dan Pembinaan Jasa Pos dan Telekomunikasi, (4) Pengawasan dan Pengendalian Jasa Pos, Telekomunikasi dan Multimedia, (5) Penataan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Menara Seluler  | (1) Berfungsinya telpon berbasis Fiber Optik Pemda DKI Jakarta, (2) Tersedianya sarana komunikasi radio trunking  |

**Bab VI**  
**Indikator Kinerja Dinas Kominfomas Yang**  
**Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran**

Alat ukur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran sebagaimana dijabarkan pada Bab III diatas menjadi Indikator Kinerja Dinas Kominfomas selama 5 (lima) tahun ke depan. Indikator kinerja ini merupakan perangkat untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Kominfomas dalam pengukuran tingkat keberhasilan Dinas Kominfomas dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam mendukung Visi dan Misi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel VI. 1  
Indikator Kinerja Dinas Kominfomas yang Mengacu  
Pada Tujuan dan Sasaran Renstra Kominfomas

| No | Sasaran   | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode (2012) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2017) |
|----|---|--|--|-----------------------------|------|------|------|------|---|
|    |   |  |  | 2013                        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |   |
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  |
| 1  | Meningkatnya pendayagunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung pelayanan publik serta pengembangan produk ekonomi dan bisnis kota | 1. Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun<br><br>2. Presentase ketersediaan sarana dan prasarana TIK | 42                                       | 50                          | 75   | 125  | 125  | 125  | 125                                       |

| No | Sasaran  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode (2012) | Target Capaian Setiap Tahun |                    |                       |                  |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2017) |
|----|--|--|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|---|
|    |  |  |  | 2013                        | 2014               | 2015                  | 2016             | 2017             |   |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                           | 6                  | 7                     | 8                | 9                | 10  |
| 2  | <b>Meningkatnya pelayanan di bidang Pos dan Telekomunikasi</b>                               | <b>1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pos dan Telekomunikasi</b><br><br><b>2. Ketersediaan sarana dan prasarana pertelekomunikasi</b>                             | 100%<br><br>20 BTS                       | 100%<br><br>5 BTS           | 100%<br><br>11 BTS | 100%<br><br>Pemb. NOC | 100%             | 100%             | 100%                                      |
| 3  | <b>Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi pada pelayanan publik seluruh SKPD</b>     | <b>1. Sistem pelayanan terpadu secara on-line</b><br><br><b>2. Persentase SKPD/UKPD yang menggunakan sistem informasi dalam mendukung pelayanan dan pengelolaan pemerintahan</b> |  | 75%<br><br>100%             | 80%<br><br>100%    | 90%<br><br>100%       | 100%<br><br>100% | 100%<br><br>100% | 100%<br><br>100%                          |
| 4  | <b>Meningkatnya jumlah pengguna layanan pengadaaan barang/jasa secara elektronik</b>         | <b>Meningkatnya jumlah pengguna layanan pengadaaan barang/jasa secara elektronik</b>   | 500 org                                  | 700 org                     | 750 org            | 700 org               | 700 org          | 700 org          | 4050 org                                  |
| 5  | <b>Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan</b> | <b>Presentase aspirasi masyarakat yang direspon media</b>  | 33%                                      | 44%                         | 50%                | 70%                   | 72%              | 75%              | 75%                                       |

| No | Sasaran  | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode (2012) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode (2017) |
|----|--|---|--|-----------------------------|------|------|------|------|---|
|    |  |   |  | 2013                        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |   |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10  |
| 6  | <b>Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik</b> | <b>1.Tingkat penyebarluasan data dan informasi melalui media eksternal dan internal</b> |  | 90%                         | 90%  | 90%  | 95%  | 100% | 100%                                      |
|    |  | <b>2.Tingkat kepuasan pelayanan data dan informasi publik Pemprov DKI Jakarta</b>       |  | 90%                         | 90%  | 90%  | 95%  | 100% | 100%                                      |

## **Bab VII**

### **Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfomas sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Kominfomas merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Renstra Dinas Kominfomas ini yang akan berlaku dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu tahun 2013 hingga tahun 2017 sesuai dengan masa berlaku RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017 menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta dan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja) Dinas Kominfomas pada jangka waktu tersebut.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Dinas Kominfomas ini memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pelaksanaan otonomi daerah urusan komunikasi, informatika dan kehumasan. Kedudukan dan peran tersebut menjadi sangat penting terutama dalam memberikan panduan dan arah perumusan kebijakan dan strategi Dinas Kominfomas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di dalam Renstra ini. Selain itu, dokumen rencana strategis ini juga menjadi landasan utama pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfomas dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Dalam perumusannya, Renstra Dinas Kominfomas tahun 2013-2017 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2013-2017, karenanya pelaksanaannya menjadi satu kesatuan gerak dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai dokumen perencanaan yang disusun dengan melakukan tahapan-tahapan perencanaan, baik teknokratis dan politis, dan dengan sebaik mungkin mempertimbangkan kebutuhan dan semua usulan yang ada, maka Renstra Dinas Kominfomas ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Renstra Dinas Kominfomas ini diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kominfomas dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas

Kominfoas merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta kepada seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta.